

HASIL RUMUSAN

KOMISI III

MATERI	: Rencana Kerja Penataan Ruang untuk Pemantapan Keamanan Nasional (Penanganan Kawasan Perbatasan)
KETUA SIDANG	: Ir. Wayan Darmawa, MT (Kabid Fisik Bappeda Provinsi NTT)
SEKRETARIS	: Ir. Jusnadi, M.Si (Kasubdit Batas Antar Negara, Ditjen PUM)
HARI/TANGGAL	: Senin/28 Maret 2005
PUKUL	: 20.00 s/d 22.00 WIB
TEMPAT	: Sumba Room Lantai 2 Hotel Borobudur – Jakarta.

Penataan Ruang Untuk Pemantapan Keamanan Nasional

1. Perumusan Masalah di perbatasan antar negara:

a. Pemanfaatan Ruang

- Masalah kedaulatan negara yang harus diselesaikan terdiri dari masalah penegasan batas wilayah, kerusakan patok batas, dan penggunaan mata uang asing;
- Tidak kompatiblenya penggunaan lahan di kawasan perbatasan di Indonesia dan negara tetangga
- Kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI dengan negara tetangga;
- Keterbatasan kemampuan pengawasan di wilayah perbatasan yang sangat luas yang menimbulkan kegiatan-kegiatan *illegal*;
- Keterbatasan infrastruktur wilayah untuk pengawasan maupun untuk pengembangan potensi ekonomi;
- Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang.

b. Penegakan Hukum

- Belum ada kejelasan tentang batas wilayah kedaulatan negara yang menyulitkan pengawasan secara teknis di lapangan;
- Rendahnya pemahaman daerah terhadap batas wilayah internasional;
- Perlunya penentuan wilayah strategis dan potensial untuk kepentingan penyelamatan dan perlindungan;
- Rendahnya peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan di lapangan.

2. Perumusan Batas Negara yang Perlu Ditetapkan Secara Hukum (*terlampir: hasil kompilasi Departemen Pertahanan*)

3. Pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani masalah perbatasan
 - Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam pengamanan kawasan perbatasan untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan dukungan sarana dan prasarana
 - TNI dan Polri berperan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi gangguan keamanan nasional.
4. Pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani masalah perbatasan
 - Keamanan negara untuk mengelola diri sesuai kemampuan pemerintah daerah dan provinsi.
 - TNI dan Polri adalah pendukung untuk menindak gangguan keamanan
 - Penggunaan kekerasan negara secara sah hanya bisa terlaksana bila sudah diterapkan prinsip keadilan sosial
5. Rekomendasi penanganan masalah perbatasan
 - Kebijakan dan strategi penataan ruang untuk mengintegrasikan wilayah daratan, lautan, dan udara kawasan pertahanan di perbatasan
 - Percepatan penetapan RUU batas wilayah negara dengan melibatkan berbagai kepentingan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
 - Bagi Provinsi perbatasan yang telah memiliki dokumen RTR Kawasan Perbatasan, perlu percepatan penetapan Perppres RTR Kawasan Perbatasan dan bagi yang belum, Pemerintah Pusat segera memfasilitasi
 - Dalam rangka meningkatkan penanganan kawasan perbatasan perlu segera dibentuk Kelembagaan Pengelola Kawasan Perbatasan
 - Pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan:
 - Perlu pembangunan ekonomi untuk mengamankan kawasan perbatasan
 - RTR perlu memberikan pengembangan kegiatan ekonomi sesuai potensi wilayah
 - Pengembangan wilayah perbatasan harus berdaya saing agar dapat menjadi beranda depan negara
 - Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai instrumen pengamanan pemanfaatan sumberdaya alam
 - Pusat pertumbuhan wilayah perbatasan
 - Kawasan Perbatasan yang memiliki batas darat harus segera dibangun prasarana transportasi di sepanjang garis perbatasan dalam rangka meningkatkan mobilitas pengamanan wilayah dan utilitas untuk kesejahteraan masyarakat
 - Untuk percepatan pembangunann kawasan perbatasan perlu peran pemerintah pusat yang lebih dominan antara lain melalui DAK
 - Perlunya Kompatibilitas pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan di wilayah Indonesia dengan negara tetangga
 - Dalam rangka pengamanan sumberdaya nasional di wilayah pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni perlu kebijakan pengamanan
 - Peningkatan kualitas pengelolaan sistem data dan informasi kawasan perbatasan sebagai basis dalam perencanaan dan pengamanan negara

- Dalam Penataan Ruang Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu memperhatikan kawasan-kawasan pertahanan yang sifatnya statis maupun dinamis
- Untuk menyempurnakan hasil rumusan ini, masing-masing daerah dan departemen terkait pengelolaan kawasan perbatasan segera menyiapkan *action plan* untuk tahun anggaran 2005-2009 dan 2005-2006.

Jakarta, Maret 2005

KETUA,

SEKRETARIS,

Ir. Wayan Darmawa, MT
(Kabid Fisik Bappeda Provinsi NTT)

Ir. Jusnadi, M.Si
(Kasubdit Batas Antar Negara, Ditjen PUM)